

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran kebebasan pers yang strategis dalam menentukan tingkat demokrasi sebuah negara menjadikan pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pers hadir untuk mengawasi para lembaga dalam menjalankan pemerintah berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pers terhadap pemerintahan bisa dilakukan lewat produk jurnalistik yang beragam. Beberapa diantaranya adalah (1) berita langsung (*straight news report*) yaitu laporan langsung mengenai suatu peristiwa dalam waktu yang singkat. (2) liputan mendalam (*depth news report*) yaitu jenis liputan dimana wartawan menghimpun informasi yang lebih rinci dalam sebuah peristiwa. (3) liputan investigasi (*investigative reporting*) berita jenis ini memusatkan pada sebuah masalah atau kontroversi dimana wartawan melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran yang terjadi sebenarnya (Suherdiana, 2020).

Indonesia sebagai negara demokrasi juga memiliki pers dan media yang berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang berjalan. Selama 10 tahun terakhir, Tempo menjadi salah satu media yang rutin mengawasi dan mengkritik kebijakan dan dinamika politik yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Sebagai media yang terkenal dengan sikapnya yang kritis terhadap kinerja pemerintahan melalui pemberitaan dalam majalah mingguannya, Tempo telah mengeluarkan variasi majalah dengan Jokowi sebagai sampul dengan konteks dan isu yang bervariasi. Terjadi dinamika yang signifikan dalam pemberitaan Jokowi yang dilakukan oleh Tempo. Pada awal masa jabatan Jokowi, Tempo memiliki kecenderungan untuk mencitrakan Jokowi dari sisi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari cara Tempo menulis judul dan *lead* berita pada majalah dengan *headline Bowo, Joko, Hatta & Kalla* pada edisi 30 Juni – 6 Juli 2014. Pada majalah tersebut, Tempo memberikan *headline* artikel tentang Prabowo

dengan kalimat “Ambisi Lama Sang Jendral”. Sedangkan Tempo memberikan *headline* artikel tentang Jokowi dengan *headline* “Meteor Politik dari Kampung”. Tidak hanya sekali, Tempo kembali memberitakan Jokowi dengan judul “Aku Rapopo : Bagaimana Jokowi berkelit dari kepungan koalisi Prabowo” dalam majalah edisi 13 Oktober 2014, Tempo memberitakan terkait upaya penjegalan pelantikan Jokowi oleh koalisi Prabowo-Hatta yang mendominasi kursi DPR RI saat itu. Pada majalah tersebut pula, Tempo memfokuskan upaya penjegalan dan penghambatan pelantikan Jokowi sebagai presiden ca. Hal ini dapat dilihat dari sampul majalah yang menunjukkan ilustrasi Jokowi berdiri di bawah payung hitam sambil memegang payung berwarna merah (Chairani & Kania, 2013). Selain ilustrasi tersebut, Tempo menambahkan ilustrasi Prabowo yang sedang menunggangi kuda mengejar Jokowi yang sedang menunggangi banteng. Ilustrasi ini mencoba untuk menggambarkan upaya penjegalan pelantikan Jokowi sebagai presiden oleh Prabowo dengan penggambaran sosok Prabowo sebagai matador yang berusaha untuk menjegal proses pelantikan (Chairani & Kania, 2013).

Penjelasan mengenai penyebab masalah oleh Tempo dalam majalah ini adalah penguasaan “paket” oleh DPR. “paket” tersebut kemudian dijelaskan oleh Tempo sebagai kepemimpinan parlemen, dimana Ketua DPR dan MPR pada saat itu berasal dari koalisi pendukung Prabowo-Hatta. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan yang ditulis Tempo dalam majalahnya sebagai berikut *Isu adanya penjegalan menguat setelah koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di parlemen berhasil menguasai jabatan pemimpin DPR dan kemudian MPR, Rabu Pekan lalu. [...] Dikuasainya “paket” pimpinan MPR ini menghembuskan kabar bahwa kubu Prabowo akan mengganggu jalannya pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014- 2019, Senin pekan depan. Kepada Tempo, Sekretaris Fraksi PKB di MPR, Abdul Kadir Karding, mengatakan sudah mendengar akan adanya aksi menghambat atau menjegal pelantikan presiden. Cara yang dilakukan adalah memanfaatkan strategi kuorum dalam sidang paripurna MPR untuk pengambilan sumpah presiden* (Chairani & Kania, 2013).

Edisi khusus kembali dikeluarkan Tempo dengan sampul foto Jokowi yang sedang melihat sebilah kayu. Majalah ini diberi *headline* “Kerja Kerja Kerja!” Tempo meliput euforia kemenangan Jokowi yang disambut oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai kemenangan rakyat. Jokowi dinilai sebagai perwakilan kalangan biasa yang kontras dengan lawannya, Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari Orde Baru dan jenderal yang terlibat dalam penculikan aktivis demokrasi (Chairani & Kania, 2013).

Tidak berselang lama, Tempo menyudahi pencitraan positif kepada Jokowi pada November 2014. Pada pemberitaan ini, Tempo menunjukkan ilustrasi Jokowi yang sedang melihat ke dalam gentong berisikan minyak yang membentuk siluet Surya Paloh. Majalah dengan *headline* “Dalam Bayang-Bayang Paloh” itu memberitakan terkait potensi Jokowi membangun oligarki yang berkecimpung melalui kerja sama pengadaan minyak dengan Tiongkok. Sejak perilisannya di bulan November 2014, Tempo kembali pada fungsi media yaitu mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintahan (Tempo, 2024).

Kritik tajam kembali dikeluarkan oleh Tempo kepada Jokowi di tahun 2019 saat masa awal periode kedua pemerintahannya berjalan. Pada tanggal 16 September 2019, Tempo mengeluarkan majalah dengan sampul yang menunjukkan ilustrasi Jokowi memiliki bayangan dengan hidung panjang menyerupai Pinokio. Majalah tersebut diberi *headline* “Janji Tinggal Janji” yang mencakup tiga liputan utama dengan *headline* “Hidup-Mati Komisi Antikorupsi”, “Jenderal Polisi Sarat Kontroversi”, dan “Batal Istana Mengkoreksi Hasil Seleksi” (Febriana et al., 2020).

Pada majalah tersebut, Tempo memuat konstruksi citra berita model *bad news*, hal ini dapat dilihat dari cara Tempo menggunakan metafora pada artikel berita serta menunjukkan ilustrasi yang kontras antara berita satu dengan berita yang lainnya. (Febriana et al., 2020).

Realisasi Nawacita selama 10 tahun terakhir memang menunjukkan ketimpangan di berbagai sektor. Meski Jokowi menekankan pembangunan menyeluruh, data membuktikan bahwa hasilnya belum merata. Nawacita yang menawarkan Di sektor penegakan hukum, kasus pencopotan Ketua MK oleh

Mahkamah Kehormatan memperlihatkan adanya konflik kepentingan yang mengkhawatirkan (Cnnindonesia, 2023). Pada sektor hak asasi manusia, terdapat 41 kasus pelanggaran HAM di Papua pada Juni 2024, termasuk 25 kontak senjata, 10 penganiayaan, dan 6 perusakan fasilitas publik, sementara kekerasan di Papua periode 2020-2021 mencapai 1.182 kasus dengan 41,31 persen melibatkan TNI/Polri (Komnas HAM, 2024). Poin Nawacita yang mengatakan bahwa pemerintahan era Jokowi akan membawa tata kelola pemerintahan yang demokratis juga masih belum bisa terealisasi sepenuhnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia masih mengalami penurunan, pada tahun 2022, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai angka 80,41 lalu turun pada 2023 menjadi 78.51 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Realisasi program Nawacita yang belum merata disambut dengan dinamika pemberitaan oleh media massa. Berbeda dengan Tempo yang kerap kali melakukan kritik terhadap pemerintah, pemberitaan yang dilakukan oleh media lain seperti Kompas.com menunjukkan yang sebaliknya. Pada pemberitaan yang terbit pada periode 2016-2017 tentang pembangunan jalan Trans-Papua sebagai bentuk realisasi Nawacita di bidang pembangunan yang merata dan berkeadilan, ditemukan pembingkai yang berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Audityawan menggunakan analisis *framing* model Pan dan Kosicki, ditemukan hasil bahwa tinjauan dari struktur sintaksis menunjukkan bahwa judul berita yang ditulis sudah jelas menerangkan maksud dari berita, bagian *lead* dari berita tersebut menunjukkan siapa yang menjadi subjek utama dalam berita, hal ini kemudian didukung dari kutipan langsung yang ditulis oleh wartawan Kompas. Penelitian ini menyatakan bahwa Kompas jelas menunjukkan keberpihakannya kepada pemerintah dan TNI AD. Hal ini dilihat dari pemilihan narasumber dan kutipan yang hanya berasal dari pihak pemerintah. Selain itu, penjelasan mengenai penulisan anggaran yang akan membuat pembaca merasa pemerintah Indonesia dan TNI AD memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua (Audityawan et al., 2022). Struktur skrip dari pemberitaan Kompas.com tentang pembangunan jalan Trans-Papua menunjukkan berita ditulis dengan

struktur piramida terbalik yang sudah memenuhi unsur 5W + 1H. Susunan penulisan menunjukkan kesinambungan informasi dari awal hingga akhir berita. Skrip berita menitikberatkan pada disparitas harga di kedua daerah sehingga pembukaan jalan Trans-Papua bisa mempermudah akses dan memangkas ongkos. Dari segi tematik, teks berita dinilai ditulis dengan baik dengan menggunakan struktur piramida terbalik dan penyusunan koherensi yang memperkuat makna tema berita bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun jalan Trans-Papua merupakan bentuk kerja pemerintah yang konkret, berita kemudian ditutup dengan praanggapan bahwa kehadiran jalan Trans-Papua bisa mengatasi masalah disparitas harga bahan pokok. Dari struktur retorik, wartawan menekankan kata “kunci utama” sebagai alat untuk menekankan bahwa pembangunan jalan Trans-Papua menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan disparitas harga bahan pokok (Audityawan et al., 2022).

Peningkatan Kompas.com dinilai hanya menonjolkan pada objek berita dan tidak menonjolkan aspek lain dalam pembangunan jalan Trans-Papua, berlanjut ke *headline* pemberitaan Kompas.com pada periode 2016-2017 tentang pembangunan jalan Trans-Papua yang juga hanya berfokus pada objek berita dan tidak mencoba untuk melihat aspek lain dari pembangunan jalan Trans-Papua. *Headline* dinilai sebagai aspek sintaksis dengan tingkat penonjolan yang tinggi dalam menunjukkan kecenderungan sebuah berita. Selain itu, sumber yang diambil oleh Kompas.com hanya berasal dari sisi pemerintah (Audityawan et al., 2022). Dari segi skrip berita yang disusun oleh Kompas.com dalam pemberitaan Trans-Papua pada periode 2016-2017 menunjukkan bahwa narasi dalam berita tidak menyertakan sumber yang jelas sehingga berita dinilai hanya opini wartawan semata. Dari segi retorik, Kompas.com dinilai memperkuat citra positif Trans-Papua dengan selalu menyertakan foto lanskap jalan Trans-Papua yang menunjukkan hamparan jalan yang luas dan panjang dengan latar belakang hutan yang lebat (Audityawan et al., 2022).

Keberagaman sudut pandang pemberitaan media ini diakibatkan perbedaan ideologi dari masing-masing media. Media massa dapat menjadi

instrumen politik bagi setiap orang atau kelompok yang memiliki kepentingan. Sebab, media massa menjadi saluran politik baingdi para elit politik. Media massa sebagai alat komunikasi politik memiliki kelebihan dan kekuatan untuk menyampaikan pesan, yaitu memungkinkan pesan secara massal, Sebagai produk jurnalistik, sebuah berita menyimpan subjektivitas seorang penulis dalam menyusun sebuah berita. Gramsci menganggap bahwa media adalah sebuah ruang dimana berbagai ideologi dipresentasikan (Imansari, 2021).

Kendati demikian, terdapat dua peran utama media, yaitu (1) untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi, dan (2) media sebagai kepentingan publik. Media sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi berperan sebagai instrumen dari hegemoni di masyarakat (*instrument of hegemony*) hegemoni diartikan oleh Gramsci sebagai sebuah upaya dominasi yang dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Di era informasi yang cepat dan luas, hegemoni menjadi instrumen yang semakin kuat digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan pesan (Sujoko et al., 2020). Selain menjadi instrumen hegemoni penguasa, media juga memiliki peran sebagai pihak yang mewujudkan kepentingan publik. Jurgen Habermas secara tidak langsung menyatakan bahwa media berperan sebagai saham milik publik untuk mewadahi proses musyawarah masyarakat untuk mencapai publik yang berotoritas. Di sisi yang lain, Plattner menjelaskan bahwa media dalam negara demokrasi berfungsi sebagai pendorong warga untuk menjadi bagian dari usaha publik (Sujoko et al., 2020).

Media massa sebagai alat politik harus menempatkan ideologinya pada kebenaran dan berpihak kepada publik. Sejatinya, fungsi utama media di luar alat komunikasi politik adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di sebuah negara demokrasi. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk mengetahui situasi dan kondisi pemerintahan terkini, media massa berkewajiban untuk berpihak kepada kebenaran dengan menyajikan fakta dan data yang berimbang dan bisa dipertanggung jawabkan. Peran tersebut menjadikan media dan politik memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah pers Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan sistem politik di Indonesia. Sebuah sistem politik yang otoriter, akan

menghasilkan pers dan produk jurnalistik yang juga otoriter, begitupun sebaliknya (Nasution & Dianto, 2023). Hal tersebut menjadikan kebebasan pers krusial dalam mewujudkan negara yang demokratis.

Munir Fuady menjelaskan bahwa salah satu upaya realisasi dari negara yang demokratis adalah tidak membatasi pers dalam menyebarkan informasi yang faktual dan akuntabel. Pembatasan tersebut termasuk pengekangan terhadap pers (*restraint*), pembredelan terhadap pers (*breide*), menyensor produk jurnalistik (*sensor*), dan pelarangan sebelum terbit (*prior restraint*) (Nasution & Dianto, 2023).

Thomas Jefferson dan James Madison mengungkapkan “*no free press, no free country, no democracy*” (Sujoko et al., 2020). Ungkapan tersebut menyatakan bahwa pers yang bebas menjadi syarat untuk sebuah negara bisa dibidang demokratis. Alexis de Tocqueville menyatakan bahwa ada tiga pilar penting dalam sebuah demokrasi. Partai politik, kelompok asosiasi politik, dan media (Sujoko et al., 2020).

Produk jurnalistik yang diterbitkan oleh sebuah media harus mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Terdapat 11 kode etik jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers guna menciptakan berita yang berkualitas serta mematuhi norma dan hukum yang berlaku (Dewan Pers, 2013). Setiap wartawan Indonesia harus mematuhi seluruh kode etik jurnalistik tersebut saat bertugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan wartawan harus menaati kode etik jurnalistik

Produk jurnalistik yang beragam dari segi tujuan penulisan dan susunan tulisan memiliki sebuah kesamaan. Sebuah berita yang sudah terbit telah melalui proses *framing* terlebih dahulu. *Framing* didefinisikan sebagai upaya untuk menyaring sebuah isu dan menekankan isu tersebut kepada publik sehingga informasi yang disampaikan bernilai dan makna yang informatif . Berdasarkan definisi dari Entman, dapat disimpulkan bahwa media melakukan *framing* guna memilih realitas yang ingin ditampilkan dan ditonjolkan lewat cara-cara tertentu. Hal ini berkaitan dengan perbedaan citra yang dihasilkan oleh media terhadap sebuah fenomena bergantung pada ideologi dari media

tersebut.

Pemberitaan realisasi Nawacita pada tahun terakhir Jokowi menjabat sebagai presiden dilakukan Tempo dalam edisi khusus 10 tahun Jokowi yang membahas terkait usaha realisasi yang dilakukan oleh Jokowi dalam sembilan sektor yang menjadi prioritas dalam program Nawacita justru menjadi sebuah hal yang melemahkan sembilan sektor tersebut. Edisi khusus terbitan tempo yang dengan *headline* “*Nawadosa Jokowi*” merangkum 18 peran Jokowi dalam kemunduran sembilan sektor prioritas Nawacita. Pemberitaan sekaligus kritik yang dilontarkan oleh Tempo menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui bagaimana Tempo sebagai sebuah media melakukan pemingkai dan penonjolan isu dalam berita terkait kegagalan realisasi program Nawacita.

Penelitian ini akan menggunakan analisis *framing* dengan model yang digagas oleh Robert N Entman untuk mengkaji cara Tempo melakukan pemingkai pada pemberitaan terkait dinamika yang terjadi dalam realisasi Nawacita selama sepuluh tahun terakhir berbeda dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media lainnya. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui teknik *framing* yang dipilih Tempo dari majalah edisi khusus 10 tahun Jokowi yang memuat terkait upaya pelemahan sektor prioritas Nawacita. Di samping itu, penelitian ini menganalisis cara tempo memilih isu, narasumber, dan data yang relevan untuk membingkai kegagalan Jokowi dalam merealisasikan Nawacita selama sepuluh tahun jabatannya. Hal ini berguna untuk mengetahui peranan Tempo sebagai media massa untuk mewartakan kepentingan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana *framing* pemberitaan kegagalan realisasi program nawacita oleh Tempo?

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini memfokuskan masalah pada pemberitaan kegagalan realisasi program Nawacita dalam 18 artikel berita liputan utama

yang ditulis dalam majalah Tempo edisi 29 Juli – 4 Agustus 2024 dengan *headline Nawadosa Jokowi*

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik pembingkaihan yang digunakan oleh Tempo dalam memberitakan kegagalan realisasi program Nawacita Jokowi pada majalah Tempo edisi 29 Juli – 4 Agustus 2024 dengan *headline Nawadosa Jokowi*

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat membawa kebaruan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis *framing* model Robert N Entman serta memperluas pengetahuan dalam penelitian dalam bidang ilmu komunikasi.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pembaca bahwa dalam melakukan pemberitaan, media akan melakukan pembingkaihan informasi yang di dalamnya terdapat susunan fakta dan kutipan yang sudah disesuaikan dengan ideologi dan kepentingan media tersebut sehingga masyarakat harus cermat dalam mencerna informasi agar dapat mengetahui informasi dari sebuah fenomena secara utuh dan berimbang.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk portal media *online* agar bisa melakukan pemberitaan secara berimbang dan utuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan, penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab yang setiap babnya terbagi menjadi sub bab yang secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup konsep dan/atau teori penelitian yang sesuai dengan masalah, dan alur penelitian atau kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Mencakup objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV

Mencakup hasil analisis *framing* pada setiap objek penelitian serta pembahasan dari hasil analisis tersebut.

BAB V

Mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran teoritis dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Mencakup kumpulan literatur yang menjadi referensi penelitian ini.